



Asosiasi
Media Siber
Indonesia



CEKFAKTA

Google News Initiative

POLICY BRIEF

**Model Kolaborasi dan Kemitraan
Mengatasi Kerawanan Pemilu 2024
di Maluku Utara**

Model Kolaborasi dan Kemitraan Mengatasi Kerawanan Pemilu 2024 di Maluku Utara

Oleh:
Arnidah
arnidah@unm.ac.id

Ringkasan Eksekutif: Berdasarkan data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2024 yang dirilis oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Provinsi Maluku Utara menduduki posisi ketiga dalam tingkat kerawanan pemilu. Pilkada serentak 2024 rentan dicemari oleh gangguan informasi, ujaran kebencian, polarisasi, kampanye hitam, ancaman manipulasi kecerdasan buatan, dan lainnya.

Upaya mengatasi dan meminimalisir tingkat kerawanan pemilu menjadi tanggung jawab bersama. Hal itu mendorong dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) melibatkan unsur terkait bertemakan “Mengawal Demokrasi Indonesia dalam Pemilu 2024 dengan Mencegah dan Mengantisipasi Menyebarluaskan Misinformasi dan Disinformasi” yang dilaksanakan di Ballroom Halmahera A Sahid Hotel, Kota Ternate, pada Sabtu, 2 September 2023. Semua data yang diperoleh dari peserta FGD menunjukkan dibutuhkannya upaya gotong royong cek fakta dari dan oleh KPU dan Bawaslu melalui gerakan koalisi dengan mitra. Mitra yang dimaksud di sini di antaranya: para relawan Masyarakat Antifitnah dan Hoaks Indonesia (Mafindo), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), media massa terverifikasi, dan khusus untuk Maluku Utara keterlibatan pihak Kesultanan Ternate sebagai opinion leader sangat mempengaruhi terciptanya partisipasi cerdas dan bijak masyarakat Maluku Utara. Selama ini masyarakat masih memiliki perilaku memilih berdasarkan atas ikatan primordial dalam pemilu.

Kolaborasi dan kemitraan salah satu kebijakan yang mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggaraan maupun pengawasan pemilu. Terdapat tiga rekomendasi untuk kebijakan pemilu Tahun 2024 yang ditujukan kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu maupun kepada Bawaslu sebagai pengawas Pemilu, yaitu: Pertama, Kolaborasi Cek Fakta (KCF) disertai diskusi bulanan cek fakta; Kedua, Peran pers sebagai penyuplai informasi dan pengontrol sosial dalam pelaksanaan dan pengawasan pemilu; Ketiga, Tersedianya kanal cek fakta lokal sebagai media verifikasi berita dan informasi, yang tersosialisasi baik dan mudah digunakan oleh masyarakat.

Latar Belakang

Pemilu Legislatif (Pileg), Pemilu Presiden Indonesia 2024 (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah 2024 (Pilkada) serentak sudah di depan mata. Pesta demokrasi yang sehat merupakan harapan semua masyarakat Indonesia, namun berdasarkan hasil olah data dari Bawaslu, pemetaan kerawanan tingkat provinsi menempatkan 5 provinsi (15%) dengan kategori rawan tinggi, 21 provinsi masuk dalam kategori rawan sedang (62%), dan 8 provinsi masuk dalam kategori rawan rendah. DKI Jakarta sebagai provinsi yang memiliki tingkat kerawanan paling tinggi dengan skor 88,95 empat provinsi lain yang masuk dalam kategori rawan tinggi adalah Sulawesi Utara (87,48), Maluku Utara (84,86), Jawa Barat (77,04), dan Kalimantan Timur (77,04) (bawaslu.go.id).

Dalam IKP 2024 ini terdapat 4 dimensi yaitu (1) konteks sosial dan politik; (2) penyelenggaraan pemilu; (3) kontestasi; (4) partisipasi, seperti gambar berikut:



Gambar 1: Dimensi dalam Indeks Kerawanan Pemilu. Sumber [Indeks Kerawanan Pemilu – Bawaslu RI](#).

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) mencuat dalam diskusi *Focus Group Discussion* (FGD) bertemakan “Mengawal Demokrasi Indonesia dalam Pemilu 2024 dengan Mencegah dan Mengantisipasi Menyebarluaskan Misinformasi dan Disinformasi” dilaksanakan di Ballroom Halmahera A Sahid Hotel, Kota Ternate.

Kegiatan ini difasilitasi oleh Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) dan mendapat sambutan positif dari berbagai pihak yang hadir, antara lain dari Bawaslu Maluku Utara, PMI Kota Ternate, pelajar, PII, LMND, Universitas Khairun, PGRI, Muslimat NU Kota Ternate, Aisyiyah Kota Ternate, HMI Cabang Ternate, PMII, KPU Provinsi Maluku Utara, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Maluku Utara, Fatayat Kota Ternate, AMAN Maluku Utara, Walhi Maluku, GMNI, KAMMI, HMI Cabang Ternate, Pramuka, GMKI, UMMU, AMSI Maluku Utara, Kesultanan Ternate, LSM JP3M Maluku Utara, dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Maluku Utara.

FGD di antaranya mengungkap informasi jadi rujukan. “Media *online* masih menjadi sarana untuk memberikan informasi tidak valid dan bersifat propaganda, sehingga banyak hoaks yang ditemukan dalam media,” ujar Arba Sahlan dari GMNI.

Perwakilan Bawaslu Maluku Utara, Adrian, mengatakan warga harus



Gambar 2: Peserta FGD Mengawal Demokrasi Indonesia dalam Pemilu 2024 dengan Mencegah dan Mengantisipasi Menyebarluasnya Misinformasi dan Disinformasi foto bersama di Ballroom Halmahera A Sahid Hotel, Kota Ternate, Sabtu, 2 September 2023 II Foto: Istimewa

berani melawan informasi bohong, mencari kebenarannya, dan berani membagikan kebenaran tersebut. Dalam rangka melawan hoaks, diperlukan gerakan-gerakan dari seluruh lapisan masyarakat. Dengan *tagline* “Jarimu Mengawasi Pemilu” diharapkan partisipasi seluruh pihak dalam mengawal tahun pemilu yang kondusif.

Suleman Saidi dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Maluku Utara menambahkan selain mengklarifikasi hoaks, perlu tindak lanjut berupa sosialisasi dan tindakan kolaborasi. Salah satu wakil dari Kelompok Cipayung, Crisvanus Tri Luhu dari GMKI, menyarankan pentingnya adanya kanal cek fakta lokal sehingga ada pusat klarifikasi di tingkat daerah terhadap hoaks dan informasi bohong yang beredar.

Harapan para peserta FGD tentu bukan hanya isapan jempol semata, sebab Pemilu 2019 lalu kolaborasi sudah dilakukan melalui dukungan dari Google News Initiative, Internews, dan FirstDraft, program *Cekfakta.com* yang telah berhasil memeriksa ribuan informasi palsu yang membuat resah masyarakat. Sejak diluncurkan pada Mei 2018, *Cekfakta.com* bekerja sama dengan 25 perusahaan media terkemuka dan didukung oleh AJI, AMSI, dan Mafindo. Kolaborasi ini telah berjalan selama lima tahun, namun tantangan dalam penyebarluasan dan penggunaan konten cek fakta masih cukup besar, terutama menjelang Pemilu 2024 yang rentan terhadap gangguan informasi, ujaran kebencian, polarisasi, kampanye hitam, dan ancaman manipulasi kecerdasan buatan.

Salah satu yang jadi elemen penting dalam pemilu di Maluku Utara adalah peran keraton, dalam hal ini kesultanan Ternate. Sebagai pemimpin yang memiliki *traditional authority* dan *religious authority* (otoritas tradisional dan agama), Sultan memiliki kharisma tersendiri dalam masyarakat adat Ternate.

Kharisma yang dimiliki Sultan dalam hubungan dengan masyarakat adat menjadi daya tarik politik oleh setiap partai politik di Kota Ternate, karena setiap *event* politik Sultan dan unsur Kesultanan selalu menjadi rebutan partai politik untuk memperoleh dukungan suara (Agusmawanda; 2009).

Maluku Utara sebagai salah satu daerah kerajaan, khususnya Kerajaan Ternate sebagai Kerajaan Islam tertua di Indonesia mempengaruhi perilaku masyarakat dalam memilih berdasarkan atas ikatan primordial. Rata-rata pemilih dalam memilih partai dan caleg atas dasar hubungan keluarga, etnis, serta figur Sultan dan Boki atau permaisuri. Karakteristik pemilih dalam masyarakat adat Ternate yang primordial dipengaruhi oleh variabel geografis, keterlibatan dalam adat, kedekatan dengan partai dan caleg serta perilaku politik Sultan dan Boki (Agusmawanda; 2009).

Rekomendasi

Kolaborasi KPU, Bawaslu, Kesultanan Ternate, media massa terverifikasi, organisasi atau komunitas independen (relawan) relevan tidak hanya dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu, hak dan kewajiban pemilih, serta menjelaskan proses pemilihan umum secara transparan dan mudah dipahami. Berikut gambaran model kolaborasi mitra yang direkomendasikan dalam *policy brief* ini yang ditujukan kepada KPU dan Bawaslu:



Gambar 3. Model Kolaborasi Mitra pada Pemilu 2024 yang Direkomendasikan

1. **Kolaborasi Cek Fakta (KCF):** merupakan praktik verifikasi informasi baik dari media *mainstream* (Radio, TV dan Surat Kabar) maupun non mainstream (media sosial) dengan melibatkan pihak KPU, Bawaslu, Kesultanan Ternate, media massa terverifikasi, organisasi atau komunitas independent (relawan) relevan. Kolaborasi Cek Fakta akan disertai diskusi, melibatkan semua unsur mitra. Dalam hal ini, KPU dan Bawaslu dapat berkolaborasi dengan *Cekfakta.com*, sebuah sebuah proyek kolaboratif pengecekan fakta yang diluncurkan Tahun 2018 diinisiasi Mafindo, AJI, dan AMSI dengan melibatkan puluhan media *online* serta jejaring ratusan pemeriksa fakta di seluruh Indonesia.
2. **Peran Pers sebagai Penyuplai Informasi:** melalui media massa terverifikasi menyebarluaskan informasi (sosialisasi) mengenai proses dan ketentuan Pemilu, kinerja peserta pemilu, serta hak dan kewajiban pemilih. Melalui peran tersebut, pers ikut aktif melakukan pendidikan politik, yaitu membantu masyarakat menentukan pilihan politik mereka. Pengawasan dan Pengaturan Kampanye: KPU memastikan adanya pengawasan yang efektif terhadap kampanye pemilu. Mereka mengatur batasan dan aturan kampanye, termasuk pengeluaran kampanye, penggunaan media, serta mencegah praktik-praktik pelanggaran pemilu dan politik uang.
3. **Kanal Cek Fakta Lokal:** merupakan praktik verifikasi informasi lokal baik dari media mainstream (Radio, TV dan surat kabar) lokal maupun media *nonmainstream* (media sosial) lokal, yang memiliki alur kerja terukur sesuai dengan standar pemeriksaan fakta khusus pada berita dan informasi lokal Maluku Utara yang berpusat di Kota Ternate.
4. **Peran Kesultanan Ternate sebagai Opinion Leader:** Perilaku memilih masyarakat asli Maluku Utara masih dipengaruhi ikatan primordial, karena rata-rata pemilih dalam memilih partai dan caleg atas dasar hubungan keluarga, etnis, serta figurel Sultan dan Boki. Pilihan politik dipengaruhi oleh geografis, keterlibatan dalam adat, kedekatan dengan partai dan caleg serta perilaku politik Sultan dan Boki. Peran Keraton mengampanyekan partisipasi pemilu, turut mensosialisasikan pemilu sehat dan bermartabat termasuk hasil cek fakta akan menjadi edukasi masyarakat yang cukup efektif. Pihak Keraton atau Kesultanan Ternate menjadi faktor yang harus dipertimbangkan sebagai mitra yang besar pengaruhnya dalam mengatasi kerawanan pemilu di Maluku Utara.

Model kolaborasi mitra di atas minimal mampu menyamai tingkat partisipasi pemilih serta menjaga kualitas Pemilu di Maluku Utara yang sudah dicapai pada Pemilu 2019, di mana Maluku Utara berhasil melampaui angka partisipasi pemilih mencatatkan angka 82 persen atau berada di atas target nasional.

Pada Pemilu 2019 ada 32 (tiga puluh dua) kasus pelanggaran Pemilu selama Pemilu 2019 di Provinsi Maluku Utara. Dari 32 (tiga puluh dua)

kasus tersebut, 1 (satu) kasus melibatkan KPU Halmahera Utara, 22 (dua puluh dua) kasus melibatkan penyelenggara Pemilu tingkat kecamatan yakni PPK tepatnya sebanyak 61 (empat puluh satu) anggota PPK, sedangkan 9 (Sembilan) kasus lainnya melibatkan penyelenggara Pemilu tingkat TPS yakni KPPS tepatnya sebanyak 45 (empat puluh lima) anggota KPPS. Adapun penyebab terjadinya pelanggaran pemilu tersebut adalah problem sumber daya manusia, faktor geografis, faktor hubungan kekeluargaan, honor yang rendah dan rekrutmen KPU di tengah tahapan Pemilu.

Dengan kolaborasi mitra yang lebih terbuka di atas, KPU dan Bawaslu semakin menunjukkan integritas dan keadilan dalam proses pemilu.

Daftar Pustaka

- Agusmawanda, 2019. Perilaku Memilih Masyarakat Adat Ternate Dalam Pemilihan Legislatif Kota Ternate Tahun 2019. Tesis. Universitas Indonesia. Jakarta
- Bawaslu RI, 2024. IKP Pemilu & Pemilihan Serentak 2024. Puslitbangdiklat Bawaslu RI. [Download IKP 2024 – Indeks Kerawanan Pemilu \(bawaslu.go.id\)](#). Diakses pada Tgl. 30 Januari 2024
- Beritain, 2023. Peranan Pers Dalam Pemilu 2024. [Peranan Pers Dalam Pemilu 2024 | beritain.co.id](#). Diakses pada Tgl. 30 Januari 2024
- Halmaherapost, 2023. Kanal Cek Fakta Lokal Diperlukan untuk Perangi Hoaks. [Kanal Cek Fakta Lokal Diperlukan untuk Perangi Hoaks – HalmaheraPost.com: Cerdas Menginspirasi. Ternate](#)
- Kasim Hendra, 2019. Integritas Penyelenggara Pemilu di Provinsi Maluku Utara dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019. [www.Journal.kpu.go.id](#). Bidang Evaluasi Kelembagaan Pemilu. Diakses pada Tgl. 30 Januari 2024

